Journal of Governance Innovation
Volume 1, Number 1, Maret 2019
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number

Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikai Berbasi Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan *Good Village Governance*

Elsa Prisanda[1)*], Rury Febrina[2)]

[1]Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia; elsaprisanda22@gmail.com
[2]Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia; rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The application of information technology is very much needed in the implementation of village government. Especially in the field of public services. The administration of public services is carried out by the village government in easy access to information and communication. However, it is different if the public services that are carried out experience several obstacles such as a lack of information disclosure to the public, public services that take a long time, a convoluted process, and inaccessible services that lead to reduced level of community satisfaction. This is due to many factors, one of which is that the village government still uses a manual system, which hinders the performance of village employees in providing effective and efficient public services. To answer the problems that occurred, the Village Government created a SISPEDAL application to simplify village administration. This search uses a qualitative approach. The data collection technique is by studying the literature and using previous research. This study uses the theory of successful elements of E-Government in the public sector, namely support, capacity, and value. The results showed that through the official SISPEDAL application of the Aliantan village government, the village government could increase transparency in order to realize good village governance within the Aliantan village government.

Keywords : *Village, E-Government, Good Village Governance*

Abstrak

Penerapan teknologi informasi sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Terutama di bidang jasa publik. Penyelenggaraan jasa publik dilakukan oleh pemerintah desa dalam kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun, lain halnya jika jasa publik yang dijalankan tersebut mengalami beberapa kendala seperti kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, pelayanan publik yang memakan waktu yang lama, proses yang berbelit-

Journal of Governance Innovation
Volume 1, Number 1, Maret 2019
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.731

belit, serta layanan yang tak dapat diakses memicu tingkat kepuasan masyarakat berkurang. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya, pemerintah desa masih menggunakan sistem manual, yang menghambat proses kinerja pegawai desa dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Untuk menjawab masalah yang terjadi, maka Pemerintah Desa menciptakan suatu aplikasi SISPEDAL untuk mempermudah administrasi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur dan menggunakan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori elemen sukses *E-Government* dalam sektor publik, yaitu *support, capacity*, dan *value*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui aplikasi SISPEDAL resmi pemerintah desa Aliantan, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dalam konteks *good village governance* dilingkungan pemerintahan desa Aliantan.

Kata Kunci : desa, *e-government, good village governance*

Pendahuluan

Penerapan teknologi informasi sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Terutama di bidang jasa publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah desa dalam kemudahan akses informasi dan komunikasi. Namun, lain halnya jika jasa publik yang dijalankan tersebut mengalami beberapa kendala seperti kurangnya keterbukaan informasi kepada publik, jasa publik yang memakan waktu yang lama, proses yang berbelit-belit, serta layanan yang tak dapat diakses memicu tingkat kepuasan masyarakat berkurang. Beberapa hal yang mempengaruhinya, seperti pemerintah desa masih menggunakan sistem manual, yang menghambat proses kinerja pegawai desa dalam memberikan jasa publik yang cepat dan tepat.

Pelaksanaan jasa publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan dapat menghambat masuknya investasi dan pembangunan ekonomi pedesaan. Pemberian jasa publik, pemerintah desa kepada masyarakat sebenarnya merupakan petunjuk dari fungsi pemerintah desa sebagai aktor kepentingan desa. Oleh karena itu, status pemerintahan desa dalam jasa publik sangat strategis, karena akan menentukan sejauhmana pemerintahan desa dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Keberadaan internet mendorong pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mendorong semua jenis kehidupan untuk memanfaatkan teknologi tersebut sepenuhnya. Penggunaan internet di pemerintahan untuk mendorong realisasi *e-government* diharapkan

dapat memberikan manfaat peningkatan kekuatan masyarakat dengan meningkatkan akses informasi, meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memperkuat interaksi antara pemerintah dan swasta di industri terkait, serta meningkatkan kemudahan dan keterbukaan pengelolaan pemerintahan. (Hardiansyah, 2011). Melalui *e-government*, dengan mengoptimalkan teknologi informasi yang ada untuk mengimplementasikan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan, pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (InPres RI) Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Teknologi Informasi) Nomor 6 yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah wajib menggunakan teknologi telematika, mendukung tata pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi dan penerapan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan *E-Government*. (Fitri et al., 2017)

Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dengan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan industri dan perdagangan, memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Keuntungan lain dari penggunaan teknologi informasi untuk instansi pemerintah termasuk mengurangi tindakan penyelewengan, meningkatkan keterbukaan, meningkatkan kecepatan, meningkatkan pendapatan dan atau mengurangi pembiayaan. (Ibrahim & Maita, 2017)

Kondisi layanan publik terlihat lebih baik. Belakangan ini, birokrasi publik secara aktif mengembangkan urusan *e-government*. Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten serta birokrasi publik lainnya menerapkan adanya tren e-government dalam sistem pemerintahan yang layak untuk diperhatikan dan dipelajari. (Nugraha, 2018)

Terkait pembangunan infrastruktur TIK di pedesaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan daerah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan pedesaan. Misalnya, pasal 86 UU Desa mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi desa yang

dikembangkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

2. Pemerintah bersama pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi pedesaan dan mengembangkan pedesaan.

3. Sistem informasi Desa terdiri dari hardware, software, jaringan dan sumber daya manusia.

4. Sistem informasi pedesaan terdiri dari data pedesaan, data pembangunan pedesaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan.

5. Sistem informasi Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan dapat digunakan oleh masyarakat desa dan seluruh aktor kepentingan.

6. Pemerintah kabupaten atau kota memberikan informasi tentang rencana pembangunan kabupaten atau kota beserta desa. (Badri, 2016)

Keberhasilan implementasi e-government di setiap instansi pemerintah yakni pemerintahan desa memerlukan dukungan perencanaan optimal pengembangan e-government.

Rencana optimalnya adalah agar penerapan e-government sejalan dengan visi dan misi pemerintah desa lebih mudah dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan menggunakan teknologi informasi yang kokoh. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah desa agar melakukan pembaharuan dari sistem informasi manual menjadi sistem informasi berbasis digital.

Pada era modernisasi saat ini, khususnya pemerintah desa dituntut untuk melakukan suatu inovasi dalam memberikan layanan publik. Karena sejatinya, layanan publik merupakan cikal bakal terbentuknya interaksi hubungan yang baik bersama pemerintah desa dengan masyarakat. Seperti yang telah diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Desa merupakan lembaga administratif terkecil dari sistem pengendalian pemerintahan desa dan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi serta terus meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan data pengelolaan kependudukan desa. (Noor Asyikin et al., 2015)

Desa Aliantan merupakan salah satu desa di kabupaten Rokan Hulu yang mengembangkan layanan informasi desa melalui aplikasi bertujuan sebagai salah satu peran pemerintah desa dalam memberikan informasi untuk masyarakat desa dengan cepat dan mudah. Perwujudan aplikasi ini merupakan

terobosan dan inovasi pemerintah desa diketuai oleh kepala desa untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi di desa. Dengan menciptakan suatu sistem untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, maka diberi nama SISPEDAL yakni Sistem Informasi Pelayanan Desa Aliantan. Pemerintah kabupaten sangat mengapresiasi inovasi desa Aliantan menciptakan aplikasi SISPEDAL untuk permudah layanan masyarakat dan secara resmi di *launching* oleh bupati Rokan Hulu H. Sukiman yang diwakili asisten II Ir. H. M Ruslan, M.Si pada selasa, 23 september 2020.

Kepala desa Aliantan, M. Rois Zakaria, SE mengatakan bahwa terciptanya aplikasi SISPEDAL ini merupakan sistem yang dibangun untuk mempermudah pemerintah desa dan masyarakat Aliantan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang berorientasi dengan memberikan kemudahan, cepat, dan transparan. Desa berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan prima, pelopor penyelenggaraan informasi, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayakan masyarakat, serta sumber data dan informasi untuk menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan. (Rozi et al., 2017)

Melalui aplikasi SISPEDAL ini ada beberapa keunggulan dan kelebihan dalam memberikan segala bentuk pelayanan di desa seperti membuat surat secara *online*, administrasi desa seperti pengurusan pengurusan surat keterangan penduduk, surat keterangan lahir, dan surat keterangan domisili, potensi desa, informasi desa dan pelayanan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan teknologi informasi berbasis aplikasi sispedal ini dalam rangka mewujudkan *good village governance*.

Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang yang telah diuraikan diatas dan pengamatan pra penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah di desa Aliantan adalah bagaimana penerapan teknologi informasi berbasis aplikasi sispedal dalam rangka mewujudkan *good village governance*.

Kerangka Teori

Penggunaan teknologi informasi menjadi bagian dari tata kelola, sejalan dengan meningkatnya permintaan akan informasi yang akurat dan cepat. Menurut Putro (2011), kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan seiring dengan pemanfaatan jaringan internet yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama mengakses dan memperoleh data yang tersedia melalui internet. Era globalisasi dan perubahan teknologi yang semakin mendorong munculnya tuntutan akan informasi yang cepat dan akurat bagi suatu hal yang wajib di bidang masyarakat. (Apriyansyah et al., 2018)

Journal of Governance Innovation
Volume 1, Number 1, Maret 2019
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.731

Pada tataran strategis, Fathoni (2010) melakukan penelitian tentang pelaksanaan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, dan menyimpulkan bahwa upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan TIK memerlukan perhatian pada beberapa hal, diantaranya menetapkan komitmen pemerintah terhadap penggunaan teknologi informasi. Informasi di pedesaan, pengenalan dan penggunaan metode TIK dengan pembentukan berbagai jenis portal yang berkaitan dengan pengelompokkan dan potensi adanya sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah, serta terjalinnya dengan industri jasa serta industri telekomunikasi. Selain itu, penelitian TIK tingkat pedesaan, seperti Siswanto (2012) tentang literasi TIK masyarakat desa menunjukkan bahwa tingkat literasi pengembangan TIK masyarakat pedesaan akan berbeda-beda sesuai dengan letak geografis desa. (Praditya, 2014)

E-Government merupakan kumpulan konsep dari semua tindakan sektor publik baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yang cepat, mudah dan terbuka. *E-Government* memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan swasta, dan antara lembaga-lembaga pemerintah. *E-Government* berada di garis terdepan upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan bagi publik, kelompok-kelompok kepentingan, pegawai pemerintah dan organisasi masyarakat. (Barker et al., 1986)

Secara umum, *E-Government* merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat, melalui pemanfaatan internet akan banyak model pengembangan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif, diharapkan masyarakat dapat secara mandiri seperti kemudahan urusan administratif dengan bantuan teknologi, semua itu bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. (Hardiansyah, 2011)

Dengan adanya *E-Government* itu merupakan digitalisasi layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan salah satu proses demokratisasi, yaitu mengurangi atau memotong garis birokrasi yang ada. Adapun tujuan *e-government* untuk meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap layanan publik pemerintah, meningkatkan akses publik terhadap sumber informasi milik pemerintah, menangani pengaduan masyarakat dan kualitas layanan yang setara yang dapat dinikmati semua

masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan *e-government* dalam pelayanan administrasi pedesaan berbasis informasi dan teknologi, yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, layanan IT, anggaran, sarana dan prasarana dan standar layanan administrasi pedesaan. (Mansur & Kasmawi, 2017)

Sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan *e-government*, Kementerian Komunikasi dan Informatika, realisasi sasaran strategis *e-government* perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat, yakni sebagai berikut:

a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
f. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

Governance adalah istilah yang menggantikan kata *Government*, artinya penggunaan kekuasaan politik, ekonomi dan administrative dalam penyelenggaraan urusan negara. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peran pemerintah, dari penyedia jasa (*provider*) menjadi promotor atau promotor dari milik negara menjadi milik rakyat. Fokus *Governance* adalah peningkatan kinerja atau kualitas. *Governance* adalah proses menjalankan kekuasaan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik. (Bahrudin, 2015)

Istilah "*Governance*" mengacu pada proses dimana seseorang dapat mengatur sumber daya kelembagaan, sosial, politik, dan ekonomi, tidak hanya untuk mendorong pembangunan, tetapi juga untuk mempromosikan kohesi, integrasi dan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan untuk mengelola suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan sangat bergantung pada kualitas tata kelola dari interaksi pemerintah dengan organisasi-organisasi dan masyarakat sipil. (Hardiansyah, 2011)

Tata kelola pemerintahan yang baik saat ini menjadi rujukan untuk menemukan cara memperbaiki

Journal of Governance Innovation
Volume 1, Number 1, Maret 2019
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.731

birokrasi berdasarkan kebutuhan reformasi. Sebagai bagian dari agenda reformasi, tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya merupakan kondisi yang ideal, yang diharapkan dapat dicapai dalam semua aspek pemerintahan yang berinteraksi dengan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Kondisi ideal ini didasarkan pada pemahaman tentang pengetahuan dasar. Tata kelola yang baik biasanya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikannya sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik.

Tujuan utama dari *good governance* untuk mencapai kondisi pemerintahan yang dapat menjamin manfaat layanan publik secara seimbang melalui kerjasama antara pihak-pihak yang berpartisipasi atau pemangku kepentingan seperti negara, masyarakat sipil dan swasta. Adapun prinsip-prinsip tata kelola yang baik harus diperhatikan dan dikembangkan meliputi: partisipasi, supermasi hukum, keterbukaan, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. (Aminudin et al., 2019). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, harus ada struktur kelembagaan yang longgar, sumber daya yang profesional, dan dukungan untuk respon dan manajemen adaptif. Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi sangat penting untuk tercapainya sinergi dan pembangunan yang optimal.

Good village governance merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil dan tertib yang pengambilan keputusannya dapat dilaksanakan pada kawasan desa. Salah satu prinsip *good village governance* adalah transparansi, dan transparansi itu sendiri adalah keterbukaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Melalui transparansi, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menyediakan informasi dan metode layanan publik yang akurat dan terpercaya. Semua prosedur pemerintahan yang harus terbuka agar pihak terkait dapat mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, salah satunya sebagai keterbukaan informasi desa yang bebas diakses oleh masyarakat.

Permasalahan umum dalam pelayanan pemerintahan adalah prosedur pelayanan yang terlalu rumit, pelayanan yang memakan waktu lama, akses website pemerintahan yang sering terputus, dan waktu pelayanan yang tidak pasti yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan adanya *e-government* dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, karena masyarakat dapat memantau seluruh proses kinerja pemerintah melalui penerapan teknologi informasi, sehingga membuat manajer sektor publik kedepannya menjadi lebih kredibel. Selain itu dapat juga

menggunakan aplikasi SISPEDAL untuk mendukung *e-government.*

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui studi literature terhadap jurnal dan media massa. Teknik analisa data dilakukan melalui reduksi, pengorganisasian data dan analisis data.

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2004: 15), untuk menerapkan *e-government* pada sektor publik, ada tiga unsur sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing unsur sukses tersebut adalah:

1. *Support*
   Unsur support merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan *e-government*. Untuk itu, diperlukan dukungan atau yang disebut juga dengan *political will*, yakni pejabat publik agar konsep *e-government* dapat diterapkan. Tanpa adanya hal itu, berbagai rencana pembangunan dan konsep *e-government* tidak dapat dilaksanakan.
2. *Capacity*
   Unsur *ability* merupakan sumber daya yang diperlukan melalui pengembangan *e-government*, sehingga konsep yang dibuat dapat menjadi kenyataan.
3. *Value*
   Unsur value didasarkan pada manfaat yang diterima pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima *e-government.* Dalam menentukan apakah *e-government* berpengaruh terhadap penerima layanan. Untuk itu, kita harus hati-hati memilih aplikasi yang menjadi prioritas, dan aplikasi ini perlu dikembangkan terlebih dahulu.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang dilakukan pada aplikasi pemerintahan desa Aliantan yang bernama aplikasi SISPEDAL. Saat ini teknologi informasi penting untuk berbagai keperluan, termasuk penyediaan layanan informasi pedesaan. Pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan keberadaan pelayanan informasi pedesaan merupakan salah satu upaya desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi semua pihak. Selain itu, untuk pengembangan potensi desa itu sendiri, perlu diperhatikan pentingnya informasi yang tersedia secara luas. Bahkan dengan sistem informasi ini, dimungkinkan untuk membangun jaringan pedesaan dengan semua pihak yang kondusif bagi pembangunan pedesaan.

Teknologi informasi sangat penting untuk pengabdian masyarakat di pedesaan, namun tidak

Journal of Governance Innovation
Volume 1, Number 1, Maret 2019
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.731

ada artinya tanpa partisipasi dari masyarakat. Dalam proses partisipasi masyarakat dalam sistem informasi, tujuan utama dari suatu aplikasi yang memberikan masyarakat hak akses informasi yang progesif dan lebih luas akan terwujud. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, sistem informasi hanya akan menjadi mesin desa yang tidak berarti, karena masyarakat akan merasa bukan miliknya.

Terobosan dan inovasi Kepala Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa dalam menciptakan layanan cepat, tepat, mudah dan terbuka dalam bentuk aplikasi patut diapresiasi, karena dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki desa dan memperbaiki pelayanan masyarakat desa kepada sistem yang mudah untuk diakses.

Gambar 1. *Items* aplikasi SISPEDAL

Aplikasi SISPEDAL ini diciptakan sebagai wujud karya inovatif desa Aliantan yang berguna untuk mengurus dan mengelola administrasi desa secara efisien. Terdiri dari beberapa *items* yakni :

1. Data Kependudukan

   Berupa tampilan data penduduk dalam bentuk resmi yang diterbitkan oleh badan pencatatan kependudukan. Yang terdiri dari adanya data kelahiran, data kematian, data penerima bantuan, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

2. Layanan Cepat

   Berupa inovasi desa dalam meminimalisir waktu dalam hal pengurusan administratif masyarakat desa. Dengan adanya sistem layanan cepat ini

dapat memudahkan akses masyarakat desa untuk mengurus seputar hal administratif dan dapat dilakukan secara *online* dari rumah masing-masing. Dari proses pendaftaran hingga *output* surat yang akan diterima oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke kantor desa untuk mengurus administratif tersebut. Seperti pengurusan surat keterangan penduduk, surat keterangan lahir, dan surat keterangan domisili.

3. Promosi Desa

Berupa tampilan bagi warga masyarakat yang ingin mengetahui tentang wilayah desa Aliantan lebih *detail*, memuat tips perjalanan yang menuntun wisatawan bagaimana mencapat desa wisata Aliantan, menunjukkan spot wisata terbaik atau aktivitas seru di desa wisata Aliantan, serta menunjukkan fasilitas yang tersedia di desa wisata Aliantan. Terdiri dari tempat wisata, produk khas, dan seni budaya.

Struktur informasi dilakukan secara teratur, jelas, tepat dan cepat serta dapat ditampilkan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat membantu kelancaran operasional pemerintahan desa. Dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi, pemerintah desa dapat berinteraksi dan bertukar informasi dengan masyarakat, sehingga mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan layanan dan informasi untuk masyarakat. (Paryanta et al., 2017)

Menurut hasil penelitian *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2004: 15), untuk mengimplementasikan *e-government* di sektor publik, tiga unsur kesuksesan yang harus dimiliki :

a. Support

Support merupakan salah satu poin penting yang menentukan keberhasilan implementasi urusan *e-government* yang mendukung pelaksanaan urusan *e-government*, antara lain :

1. Political Will

Political will merupakan dukungan dari implementasi nyata oleh pemerintah. Tanpa kemauan politik, proses penerapan dan penggunaan *e-government* di Desa Aliantan tidak dapat berjalan dengan lancar. Adanya dukungan kemauan politik membuktikan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan *e-government.* Dalam menerapkan e-government di Desa Aliantan, itu didasarkan pada hukum dan peraturan :

1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Journal of Governance Innovation
Volume 1, Number 1, Maret 2019
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.36636/jogiv.v3i2.731

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Kepada Desa Disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hulu diserahkan pengaturannya kepada Desa dalam hal itu termuat salah satunya urusan pemerintahan bidang penerangan/ informasi dan komunikasi. Yang mana berisi tentang penanggulangan bencana alam skala pedesaan, melalui media *conference* untuk memperluas pengaruh terhadap berbagai kebijakan daerah, membina kelompok komunikasi sosial, membina pemancar radio desa, memantau peredaran media informasi, mengelola media pedesaan, mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi, serta menentukan informasi jenis pengembangan. Dalam hal ini, Desa Aliantan telah mampu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penerangan/ informasi dan komunikasi berupa penciptaan aplikasi SISPEDAL dalam pengembangan jaringan informasi dan komunikasi untuk mempermudah administrasi di desa secara cepat dan tepat.

2) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Disebutkan bahwa pemerintah daerah, penggunaan internet, telepon dan konferensi video, serta email akan meningkat secara bertahap dan penggunaan komunikasi hardcopy harus diminimalkan. Dalam hal ini, Desa Aliantan telah mampu melaksanakan pengembangan *E-Government* dilingkungan Desa dengan implementasi adanya penggunaan dari aplikasi SISPEDAL sehingga proses surat menyurat akan lebih fleksibel dengan sistem *online* memudahkan efisiensi dan efektivitas masyarakat.

Berbagai regulasi tentang penerapan *e-government* di Desa Aliantan tampaknya sudah cukup baik, dan kontennya yang detail menjadi dasar hukum penerapan *e-government* di Desa Aliantan. Hal ini terlihat dari Pemerintah Desa Aliantan khususnya Kepala Desa yang telah melakukan terobosan dan

inovasi, dengan membuat program aplikasi SISPEDAL untuk masyarakat dapat lebih muda mengelola urusan administrasi pemerintahan desa, sehingga tercapai pengelolaan tingkat desa yang terbaik.

2. Sosialisasi

Pemerintah desa telah mensosialisasikan penerapan *e-government* supaya agar masyarakat dapat memahami dan menikmati layanan pemerintahan desa berbasis elektronik. Pemerintah Desa Aliantan melakukan sosialisasi *e-government* dilakukan di dalam desa, melalui hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat sebagai pengguna aplikasi dapat memahami dan menikmati layanan pemerintahan desa.

3. Kontinuitas

Kontinuitas merupakan keberlangsungan aplikasi *e-government* di Desa Aliantan. Pengelolaan *e-government* di Desa Aliantan menitikberatkan pada pengintegrasian seluruh layanan administrasi tingkat desa, yakni Desa Aliantan ke dalam satu portal sehingga penyebaran data dan informasi dapat terkoordinasi melalui aplikasi SISPEDAL, sehingga memudahkan untuk terhubung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan dan pelayanan yang tepat.

b. Capacity

Penerapan *e-government* sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan *e-government.* Kemampuan mempengaruhi implementasi *e-government* di Desa Aliantan meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan infrastruktur teknologi informasi.

1. Sumber Daya Manusia

Di Desa Alintan, sumber daya manusia atau pegawai desa tidak cukup untuk mengelola urusan *e-government.* Hanya sedikit perangkat desa yang menguasai TIK dan memiliki kemampuan TIK. Pada saat pengajuan resmi aplikasi SISPEDAL secara kuantitas dan kualitasnya sangat terbatas.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu hal terpenting untuk mendukung keberhasilan implementasi *e-government* di desa. Sumber daya keuangan diperlukan untuk mendukung ketersediaan sumber daya lain, seperti infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia untuk pelatihan pegawai desa, penambahan dan

pemeliharaan peralatan, dan biaya lainnya. Sumber dana untuk implementasi *e-government* di Desa Aliantan berbasis *platform*, dan karena baru diluncurkan pada September 2020, belum ada kerja sama dengan pihak swasta/ pemangku kepentingan lainnya.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Tanpa infrastruktur pendukung, pemerintahan desa berbasis elektronik tidak dapat terwujud. Dibandingkan dengan desa lainnya, infrastruktur penerapan *e-government* di Desa Aliantan semakin berkembang dengan sangat baik setiap tahunnya. Desa Aliantan merupakan desa pertama yang membuat aplikasi untuk memudahkan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Meski baru mengenal *e-government*, Desa Aliantan dapat mengatasi beberapa faktor alam serta masalah teknis dan pemeliharaan, seperti peralatan atau antena yang menjadi *server* yang tidak terpengaruh oleh faktor cuaca. Tak hanya itu, Desa Aliantan juga menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Provinsi Riau.

c. Value

Setelah implementasi *e-government*, manfaat yang diperoleh Pemerintah Desa Aliantan antara lain: meningkatkan pelaksanaan dan efisiensi operasional pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Melalui penerapan SISPEDAL, pemerintahan Desa Aliantan dapat meningkatkan transparansi untuk mewujudkan *good village governance* dalam pemerintahan Desa Aliantan.

Manfaat masyarakat sebagai pengguna dan tujuan penerapan *e-government* antara lain: melalui aplikasi resmi pemerintahan Desa Aliantan, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memperoleh berbagai informasi tentang Desa Aliantan, serta dapat memberikan kritik, saran kepada pemerintah dan berkomunikasi dengan pemerintah desa. Masyarakat tidak harus langsung mendatangi kantor desa, melalui fasilitas yang tersedia di aplikasi, sehingga masyarakat juga bisa mengontrol kinerja pemerintah.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Implementasi teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi suatu desa. Hal ini penting untuk mewujudkan pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat di tingkat desa. Keberadaan sistem informasi dan internet berguna dalam upaya mencapai kualitas

tata kelola di elemen desa. Di tingkat pemerintah desa, menerapkan *e-government* tidak menjadi kendala untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan komunikasi lintas pemerintahan.

Permasalahan yang sering terjadi pada pelayanan pemerintahan adalah prosedur pelayanan yang terlalu rumit, pelayanan yang memakan waktu lama, akses pemerintahan yang sering terputus dan ketidakpastian waktu yang sering dikeluhkan masyarakat. Dengan adanya *e-government* dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, karena masyarakat dapat memantau seluruh kinerja pemerintah melalui penerapan teknologi informasi, sehingga membuat manajer sektor publik kedepannya menjadi lebih kredibel. Selain itu, dapat juga menggunakan aplikasi SISPEDAL untuk mendukung *e-government.* Aplikasi dalam *e-government* sektor publik, harus ada tiga unsur sukses, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*.

Dengan adanya *e-government* dapat meningkatkan efisiensi internal, memberikan pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, serta dapat berjalan lebih cepat. Terlihat jelas dari berbagai dokumen tentang *e-government* bahwa manfaat yang paling signifikan dari *e-government* adalah efisiensi, kemudahan, dan aksesibilitas layanan publik yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, rekomendasi yang ditargetkan dikemukakan untuk meningkatkan kualitas *e-government* di Pemerintah Desa Aliantan antara lain :

1. Meningkatkan anggaran untuk pengembangan *E-Government* di Desa Aliantan dengan meningkatkan anggaran dan kerja sama yang lebih luas dengan pihak swasta/ *stakeholders.*
2. Perlu kerja sama dengan tenaga eksternal yang lebih mampu di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan sumber daya manusia dan materi melalui pelatihan.
3. Ada kebutuhan untuk terus melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat tentang keberadaan *e-government* dan pemanfaatannya melalui media publik yang ada, seperti iklan *banner,* baleho dan penyelenggaraan kegiatan publisitas yang mempersatukan pemerintah dan masyarakat.
4. Pengembangan *e-government* membutuhkan kemauan politik yang kuat agar pegawai desa memiliki inisiatif yang sama dalam

pengembangan *e-government*. *Political will* merupakan keinginan para pemimpin untuk merumuskan rencana pembangunan pengabdian masyarakat. Hubungan dengan pengembangan *e-government* sebagai cara bagi para pemimpin untuk memiliki konsep dan rencana yang matang dalam pengembangan *e-government*, serta dapat merangsang konsep yang sediakan oleh kebijakan yang lainnya.

Daftar Pustaka

Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. P. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, *4*(1), 10–24. journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp

Arif, S. (n.d.). *ANALISIS PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI PENYELENGGARAAN WEBSITE Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.

Badri, M. (2016). PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi pada Gerakan Desa Membangun). *Jurnal Risalah*, *27*(2), 62–73.

Bahrudin, A. (2015). *Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance Pendahuluan Good Governance Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemerintahan Desa*.

Barker, W. C., Johnson, G. C., Hunt, L. T., George, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar domains in different proteins: detection and significance. *Tanpakushitsu Kakusan Koso. Protein, Nucleic Acid, Enzyme*, *29 Suppl*, 54–68.

Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik. *POSITIF : Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, *3*(2), 99–105. https://doi.org/10.31961/positif.v3i2.429

Governance, L., Aminudin, A., & Bengkulu, U. (2019). *J p a l g*. *3*(1).

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator dan Implementasinya. *Gava Media*, 250. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf

Ibrahim, W. H., & Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publikberbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, *3*(2), 17–22.

Mansur, M., & Kasmawi, K. (2017). Pengembangan Sistem Database Terpadu Berbasis Web Untuk Penyediaan Layanan Informasi Website Desa. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, *3*(1), 73–82. https://doi.org/10.25077/teknosi.v3i1.2017.73-82

Noor Asyikin, A., Fitri, R., Setiyo Budi, A. N., & Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Banjarmasin, S. (2015). Pengukuran Tingkat Kesiapan Kantor Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Masterplan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Perkantoran Desa Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1. *ISSNPrint) Jurnal POROS TEKNIK*, *7*(2), 2085–576154.

Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, *2*(1), 32–42.

Paryanta, Sutariyani, & Desi, S. (2017). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan. *IJSE - Indonesian Journal on Software Engineering*, *3*(2), 77–81. https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/download/2980/1929

Praditya, D. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, *17*(2), 129–140. https://doi.org/10.20422/jpk.v17i2.12

Rozi, F., Listiawan, T., & Hasyim, Y. (2017). Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, *2*(2), 107–112. https://doi.org/10.29100/jipi.v2i2.366